

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang 50132 Telepon 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605

PENGUMUMAN

NOMOR: B/800.1.2/021/2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13469/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kota Semarang mendapatkan alokasi formasi sebanyak 2.416 (dua ribu empat ratus enam belas), dengan rincian nomor peserta, nama, jabatan, dan unit penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

Sehubungan hal tersebut dan sesuai Surat Edaran Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peserta wajib melakukan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masingmasing peserta di laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 28 Agustus s/d 22 September 2025.
- b. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebagai berikut dengan:
 - 1) **File Pas Foto Terbaru Pakaian Formal** dengan latar belakang berwarna merah (rasio 4x6, ukuran file maksimal 500KB, dengan jenis file .jpg).
 - 2) **Scan Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
 - 3) **Scan Transkrip nilai asli** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
 - 4) Scan hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dapat di unduh melalui laman https://sscasn.bkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani oleh peserta di atas meterai Rp. 10.000,- ukuran file maksimal 1000 KB, dengan jenis file .pdf.
 - 5) **Scan Surat Pernyataan 5 Poin** yang telah ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 10.000,- dengan jenis file .pdf ukuran file maksimal 1000 KB, yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;





- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
- c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
- d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
- e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 6) **Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** untuk keperluan "Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu" yang masih berlaku sampai dengan bulan Desember 2025 ukuran file maksimal 1000 KB, dengan jenis file .pdf.
- 7) **Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah ukuran file maksimal 1000 KB, dengan jenis file .pdf.
- 8) **Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah ukuran file maksimal 1000 KB, dengan jenis file .pdf.
- c. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Peserta tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf b, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Semarang.

d. Lain-lain:

- Peserta dilarang melakukan kecurangan pada seluruh tahapan PPPK Paruh Waktu. Apabila terbukti melakukan kecurangan, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
- 2) Jika peserta pada saat melengkapi persyaratan Usul NIPPPK Paruh Waktu terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur/mengundurkan diri.
- 3) Peserta yang mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, kepada yang bersangkutan tidak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
- 4) Seluruh tahapan pelaksanaan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Semarang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Semarang.
- 5) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini, berakibat pada kerugian peserta sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab peserta.
- 6) Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

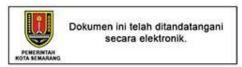




7) Pelayanan informasi akan diumumkan secara resmi melalui website http://bkpp.semarangkota.go.id atau media sosial Instagram @bkppsemarangkota dan pengaduan terkait pelaksanaan tahapan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kota Semarang dapat menghubungi layanan pada nomor **082325057492** pada hari dan jam kerja hanya dalam bentuk chat Whatsapp.

Semarang, 12 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG,



BUDI PRAKOSA, S.T., M.T.



